



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NOER AZAM ACHSANI**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **128448**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.635.904.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m²/130 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 344.112.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m²/36 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 1854 m² di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 1897 m² di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah Seluas 400 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
6. Tanah Seluas 600 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m²/87 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 399.792.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m²/62 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **180.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS SEDAN Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	2.000.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.836.528.213
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	10.652.432.213
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.652.432.213

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.